

**PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**Sesilia M. Sundah¹
Octavianus M. T. Muaja²
Erick A. A. Sumakud³**

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik De La Salle Manado

Email: ¹monicasundah29@gmail.com

²omuaja@unikadelasalle.ac.id

³esumakud@unikadelasalle.ac.id

ABSTRACT

Human resource competency refers to the ability of human resources to carry out assigned tasks and responsibilities due to possessing adequate education, training, and experience. In this context, financial managers who are lacking competency will be unable to complete their work efficiently, effectively, and economically. Competency allows time savings in financial reporting as knowledgeable and skilled financial managers understand the necessary procedures, enabling timely completion and presentation of financial reports. The regional financial accounting system documents and processes regional financial data and related data, starting from encompassing data collection, recording, summarization, and reporting, ultimately presenting financial information to the public. This information also serves as a basis for decision-making in planning, implementation, and accountability reporting. The purpose of this study was to determine the influence of financial management competency and the regional financial accounting system on the quality of regional financial reporting in Local Government Agencies of North Minahasa Regency. This study employed a quantitative research method. Data collection utilized primary data gathered through questionnaires. The population consisted of all 150 finance staff members within the Local Government Agencies of North Minahasa Regency. A sample size of 110 was determined using stratified random sampling and calculated using Slovin's Formula. The results of this study indicated that partially, financial management competency did not influence the quality of financial reporting, while the regional financial accounting system significantly influenced the quality of regional financial reporting.

Keywords: Financial Management Competency, Regional Financial Accounting System, Quality of Regional Financial Reporting

ABSTRAK

Kompetensi sumber daya manusia mengacu pada kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan karena memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Dalam konteks ini, manajer keuangan yang tidak memiliki kompetensi tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Kompetensi memungkinkan penghematan waktu dalam pelaporan keuangan karena manajer keuangan yang berpengetahuan dan terampil memahami prosedur yang diperlukan, sehingga memungkinkan penyelesaian dan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu. Sistem akuntansi keuangan daerah mendokumentasikan dan memproses data keuangan daerah dan data terkait, mulai dari pengumpulan, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan, yang pada akhirnya menyajikan informasi keuangan kepada publik. Informasi ini juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi penelitian ini adalah seluruh staf keuangan yang berjumlah 150 orang di Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Jumlah sampel sebanyak 110 ditentukan dengan menggunakan stratified random sampling dan dihitung dengan menggunakan Rumus Slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, kompetensi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Kata kunci: Kompetensi Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Perkembangan pengelolaan keuangan daerah mengalami masa reformasi yang besar. Langkah ini merupakan kemajuan besar dalam manajemen keuangan, terutama dalam hal sistem pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya, sistem pengelolaan keuangan pemerintah berpusat, dengan pusat yang memantau langsung bagaimana uang digunakan. Saat ini, setiap daerah harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana itu membantu meningkatkan kesejahteraan daerah dengan mengelola sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, yang kemudian keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah (PP 71 tahun 2010)

antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah. Dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan. BPK dapat memberikan empat opini berupa: opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (TMP). Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah meraih opini WTP 6 kali berturut-turut. Yang mengartikan bahwa pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan adalah: (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan; (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian internal.

Dari beberapa Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara Peneliti tertarik untuk meneliti di Kabupaten Minahasa Utara karena dari hasil audit BPK kabupaten Minahasa Utara meraih 8 kali WTP dari tahun 2015 – 2022 komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Meski begitu, kebanggaan atas capaian prestasi-prestasi tersebut sebenarnya sangat berbanding terbalik dengan pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun Anggaran 2022 lalu. berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2022, BPK RI menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022. Dilansir dari <https://beritaonlinelokal.com>.

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) itu sendiri merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya karena mereka memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup. Sangat penting bagi sumber daya manusia (SDM) untuk menyusun laporan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Sumber daya manusia dalam hal ini pengelola keuangan, jika tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Selain kompetensi pengelola keuangan, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Laporan keuangan daerah menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kompetensi pengelolaan keuangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan.

LANDASAN TEORI

Kompetensi Pengelolaan Keuangan

Menurut Wibowo (2007:110) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tertentu, dengan indikatornya adalah :

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan meliputi :

1. Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidang masing-masing.
2. Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam institusi pemerintahan.

b. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan individu meliputi:

1. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.
2. Kemampuan berkomunikasi dengan jelas secara lisan.

c. Sikap (*Attitude*)

Sikap individu, meliputi :

1. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam bekerja.
2. Adanya semangat kerja yang tinggi.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pada Pasal 1 Ayat (2) adalah Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut PP RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memaparkan definisi pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah yang berfokus pada kepentingan publik.

Prinsip – prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada dasarnya pada setiap aktivitas keuangan di daerah memiliki prinsip-prinsip yang mendasari aktivitas tersebut. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki prinsip tersendiri. Menurut Mardiasmo (2018:105) terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas
2. *Value for money*

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)
4. Transparansi Merupakan keterbukaan pemerintah
5. Pengendalian

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Nurlan (2009:37) pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019:19) Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu. Selain itu, dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu asumsi dasar yang penting dalam akuntansi. Hal ini disebabkan karena asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan. Indikator sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan
Pencatatan adalah pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada.
2. Pengidentifikasian (Penggolongan)
Pengidentifikasian adalah transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.
3. Pelaporan
Pelaporan adalah transaksi ekonomi menghasilkan laporan keuangan yaag merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar memiliki prosedur yang dimana bertujuan untuk mencerminkan suatu informasi yang terstruktur. Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2014 pengertian laporan keuangan pemerintah adalah hasil dari proses akuntansi yang dilaporkan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau Lembaga dilingkungan pemerintah pusat, suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat atau daerah.

Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2005 pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan pemerintah disebut dengan pengguna laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan pemerintah dapat juga diidentifikasi dengan menelusuri siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah:

1. Masyarakat.
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.
4. Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara di 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa Utara.

Jumlah populasi sebanyak 150 pegawai di 32 OPD. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 110 pegawai bagian keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penentuan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus Slovin. Untuk teknik pengumpulan sampel peneliti menggunakan *Probability Sampling* dengan metode *Stratified Random Sampling*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan pernyataan yang diberikan oleh peneliti dan dijawab oleh responden. Peneliti menggunakan sumber data yaitu data primer. Penelitian ini akan menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu dan akan dikembangkan menjadi pernyataan yang sesuai dengan indikator yang terkait, dan Skala pengukuran data dalam penelitian ini yaitu skala interval, sedangkan skala yang digunakan untuk pengukuran instrumen penelitian yaitu menggunakan skala likert, kemudian Data yang diperoleh dari Kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda yang ada pada aplikasi SPSS Ver.27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa kuesioner yang dibagikan pada seluruh pegawai yang ada pada (OPD) Kabupaten Minahasa Utara. Sampel tersebut dipilih dari populasi yang terdiri dari pegawai bagian keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa Utara.

Dari hasil uji instrumen yang pertama yaitu uji validitas diketahui semua variabel dinyatakan valid karena didapatkan nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,187 dengan taraf signifikan 5%. Sedangkan uji reliabilitas diperoleh hasil Cronbach's Alpha > 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variable kompetensi pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah hasilnya reliabel sehingga dapat dikatakan layak.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna (korelasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikoleniaritas dapat dilihat dari nilai tolerance / variance

inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance $\geq 0,1$ / $VIF \leq 10$, maka dapat dikatakan model telah bebas dari masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji glejser tingkat signifikansi variabel bebas $\geq 0,05$ yang berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda, model ini terdiri dari dua (2) variabel bebas yaitu Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X2) dan satu variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel berikut:

Hasil Analisis Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,16	4,471		2,944	0,004
	kompetensi pengelolaan keuangan (X1)	0,059	0,133	0,042	0,442	0,659
	sistem akuntansi keuangan daerah (X2)	0,702	0,104	0,643	6,748	0

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan daerah (Y)

Berdasarkan pada Tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda adalah :

$$Y = 13,160 + 0,059X1 + 0,702X2$$

Persamaan hasil regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka nilai konstans adalah sebesar 13,160. Nilai koefisien regresi dari kompetensi pengelolaan keuangan 0,059 yang artinya bahwa setiap peningkatan sebesar 1 satuan dari kompetensi pengelolaan keuangan (X1) maka akan terjadi peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,059. Nilai koefisien regresi dari sistem akuntansi keuangan daerah (X2) sebesar 0,702 yang artinya bahwa jika terjadi peningkatan sebesar 1 satuan pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,702. Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Untuk menguji apakah kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil Uji T

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardize		
				d		
				Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	13,16	4,471		2,944	0,004
	kompetensi pengelolaan keuangan (X1)	0,059	0,133	0,042	0,442	0,659
	sistem akuntansi keuangan daerah (X2)	0,702	0,104	0,643	6,748	0,000

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan daerah (Y)

Pada tabel diatas hasil uji t pada kompetensi pengelolaan keuangan memperoleh nilai signifikan $0,659 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,442 < t$ tabel $1,982$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak berpengaruh signifikan kompetensi pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $6,748 > t$ tabel $1,982$ maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh signifikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Uji F atau dikenal dengan uji signifikan secara simultan dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel independen/bebas yaitu X1, X2, dalam mempengaruhi variabel dependen/terikat. Untuk menguji apakah kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1141,609	2	570,805	43,919	<,001 ^b
	Residual	1390,654	107	12,997		
	Total	2532,264	109			

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), sistem akuntansi keuangan daerah (X2),

Berdasarkan hasil dari tabel diatas. Menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai Fhitung $43,919 >$ dari Ftabel $3,08$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Menurut Sugiyono (2018:224) Koefisien korelasi merupakan angka hubungan kuatnya antara dua variabel atau lebih.

Hasil uji Koefisiem Korelasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estim at e#	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.671 ^a	0,451	0,441	3,60510	0,451	43,919	2	107	0,000

a. Predictors: (Constant), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), kompetensi

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi berganda pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka variabel independen berkorelasi dengan variabel dependen. dan dapat dilihat nilai R memiliki nilai sebesar 0.671 maka dapat dinyatakan bahwa tingkat hubungan pada variabel independen berkorelasi/berhubungan dengan variabel dependen yaitu 67,1%. yang artinya variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan korelasi yang kuat.

Menurut Sugiyono (2018:284) koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Berikut merupakan hasil data olahan untuk uji koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estim at e#
1	.671 ^a	.451	.441	#

a. Predictors: (Constant), sistem akuntansi keuangandaerah (X2), kompetensi pengelolaan keuangan (X1)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu Adjusted R Square sebesar 0,441 atau setara dengan 44,1% yang dimana dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. sedangkan 55,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Kompetensi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini dikarenakan perlunya pegawai yang berkompetensi dalam pemahaman pengelolaan keuangan untuk menciptakan laporan keuangan yang akurat dan bisa menggambarkan kondisi keuangan pada suatu instansi pemerintahan.

2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini dapat dilihat dari jelasnya prosedur mulai dari proses pencatatan, pengidentifikasian dan pelaporan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer yang dilakukan untuk dapat menghasilkan dan memudahkan penyusunan laporan keuangan oleh instansi terkait.
3. Kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa Utara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah.

Saran

1. Bagi pemerintahan agar lebih meningkatkan kembali kompetensi bagi setiap pegawai bagian keuangan pada setiap OPD di Kabupaten Minahasa Utara serta menerapkan perekrutan pegawai berdasarkan kompetensi keahlian masing-masing pegawai agar lebih meningkatkan kualitas atas laporan keuangan serta mempertahankan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang telah digunakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan sampel, metode penelitian dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Beritaonlinelokal. 2022. <https://beritaonlinelokal.com/dibalik-banjir-penghargaan-bupati-minahasa-utara-dapat-7-temuan-dan-9-rekomendasi-dari-bpk/>(Diakses pada 13 februari 2024)
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/>. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>) (Diakses 15 februari 2024)
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018*. 2024. <http://www.bpk.go.id>.(Diakses pada tanggal 5 Mei 2024)
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*. 2017 <http://www.bpk.go.id>. (Diakses pada tanggal 6 Mei 2024)
- Bahri. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Defitri, S. Y. 2018 . *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Benefita. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
- Djaman Satori. 2007. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka Erlina. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Cetakan ke VIII.

Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Husna, Maryam, & Ikhbar, S. 2022. Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*. (Diakses pada 20 Februari 2024)
- Hervesi, 2005. *Standar Kontrol Internal pada Pemerintahan*. Terjemahan Anugerah, Universitas Airlangga
- Hartono. 2019. *Metodologi Penelitian Dilengkapi Analisis Regresi dan Path Analysis IBM SPSS Statistic Version 25*
- Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Kasmir. 2019 . *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro. 2005. *Strategi Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Leunupun, Persulesy, & Souhuwat. 2022. Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*. (Diakses pada 19 februari 2024)
- Marwansyah. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta
- Mahmudi. 2016. *Anlisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2014. *Akuntansi sektor publik*, Yogyakarta: Andi
- Nurlan. 2009. *Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PT*. Macan Jaya Cemerlang. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Priyanto. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Akuntan Pemerintah (SAP), Lampiran I.01, Kerangka Konseptual – 10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Sujarweni. 2020 . *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta, CV.Reza I. P. dan Halmawati.